

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pada Bab satu ini penulis akan membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi sembilan sub bab, antara lain sebagai berikut: Alasan penulisan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan. Sub Bab tersebut masing – masing akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Konflik Korea Utara dan Korea Selatan menjadi isu yang kompleks di kawasan Asia Timur, Konflik ini lebih diperparah ketika Korea Utara mengembangkan program nuklirnya dengan cara membuat senjata nuklir untuk alat perlindungan terhadap negaranya, setelah berbagai macam perundingan kedua Negara inipun belum menemukan hasil damai, gagalnya perundingan damai ini dikarenakan perilaku kedua negara yang dianggap mengancam oleh masing – masing lawannya. Sebagai contoh dengan adanya pembangunan persenjataan nuklir di Korea Utara, kekhawatiran ini menjadi – jadi sejak Korea Utara keluar dari NPT dan juga Korea Utara melakukan Uji coba nuklir pada tahun 2006, untuk menekan konflik ini dibentuklah Perundingan enam Negara (*Six Party Talks*) sebagai bentuk program menuju denuklirisasi Korea Utara. Perjanjian ini ternyata jauh dari kata keberhasilan, program nuklir Korea Utara secara langsung menyebabkan kekhawatiran negara lain serta mengancam stabilitas keamanan kawasan tersebut. Konflik ini menarik untuk

dibahas karena telah menjadi perhatian bagi dunia internasional dan mempengaruhi situasi keamanan internasional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan judul tentang *“Upaya Menuju Denuklirisasi Korea Utara oleh Negara Anggota Six Party tahun 2006 – 2009”*.

## **B. Latar Belakang**

Awal mulanya Korea utara tergabung dengan wilayah Korea Selatan, karena terjadi perselisihan dalam kedua wilayah Korea kemudian berimbas pada terjadinya perang saudara antar semenanjung Korea<sup>1</sup>. Saat kekalahan Jepang atas Amerika Serikat di perang dunia kedua, semenanjung Korea lantas diperebutkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada perang dingin 1991 yang berakhir dengan kekalahan Uni Soviet atas Amerika Serikat. Akhirnya Korea dibagi menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea utara berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, dan Korea selatan berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Kedua negara ini juga mengadopsi sistem pemerintahan dari negara - negara besar tersebut. Korea selatan dengan demokrasi Amerika Serikat, dan Korea Utara dengan komunis Uni Soviet.

Pada perkembangannya, Korea Utara menjadi Negara yang tergolong miskin dengan perkonomian negaranya yang lemah, tetapi Korea Utara berhasil mengembangkan senjata nuklir. Keberhasilan itu didorong oleh kemampuan Korea Utara untuk menciptakan senjata-senjata militer, sepanjang sejarahnya Korea Utara

tergolong sebagai lima Negara penghasil senjata militer terbesar di dunia. Atas dasar itulah sehingga tidak heran jika Korea Utara berhasil menciptakan senjata nuklir.

Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 ketika sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir ditandatangani. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moscow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain<sup>2</sup>. Sebagian besar generasi pertama ilmuwan nuklir Korea Utara dilatih dalam program ini. Namun teknologi yang dimiliki mereka tidak cukup maju untuk memproduksi senjata nuklir tanpa bantuan dari Negara – Negara lain.

Pada tahun 1965 ditandai dengan pendirian Akademi Militer Hamhung, di mana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal<sup>3</sup>, pada tahun ini juga Uni Soviet mulai menyediakan bantuan secara meluas kepada Korea Utara dalam pembangunan pusat penelitian di Yongbyon. Fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara ini adalah reaktor nuklir model Uni Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon, 100 kilometer utara Pyongyang, di Sungai Kuryong, di tempat ini Uni Soviet membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW. Reaktor ini sangat kecil sehingga tidak menjadi perhatian negara – negara sekitar karena membutuhkan waktu

---

<sup>2</sup>Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, "The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects," *Korea Observer* Vol.39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008), hlm. 490.

<sup>3</sup>Josank S. Bermudez, Jr. "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK." *Occasional*

bertahun – tahun bagi reaktor tersebut untuk memproduksi plutonium yang cukup dan menjadi sebuah bom nuklir. Fasilitas nuklir ini juga dilaksanakan secara mandiri dan terfokus pada lingkaran bahan bakar nuklir (penyulingan bahan bakar nuklir).

Dengan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon, Korea Utara memperoleh plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir yang mendorong Kim Il Sung memutuskan untuk membangun senjata nuklir<sup>4</sup>. Bagi Korea Utara, senjata nuklir akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Selain itu senjata nuklir dapat menangkal serangan Amerika Serikat dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Negara – Negara Komunis lainnya (Uni Soviet dan Cina). Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang selama ini tidak ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas internasional. Lebih jauh lagi, dikarenakan Korea Utara menghadapi situasi keamanan yang lemah terutama sepanjang Perang Korea, pengembangan senjata nuklir menjadi sumber keamanan rezim bagi Kim Il Sung dan pemimpin-pemimpin berikutnya<sup>5</sup>.

Korea Utara mulai meningkatkan kekuatan militernya pada tahun 1960-an. Doktrin dan struktur kekuatan militer Korea Utara saat itu berorientasi *ofensif*<sup>6</sup> dengan kata lain Negara ini sedang dalam keadaan siaga menghadapi serangan militer dari negara lawannya. Secara keseluruhan, pada tahun 1960-an, Korea Utara berusaha memproduksi ataupun memperoleh roket, rudal, dan pengembangan sumber daya

---

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>Jessica Kuhn, "Global Security Issues in North Korea," *Multilateralism in Northeast Asia*, (Task Force, 2010), hlm. 38.

<sup>6</sup>

manusia guna mendukung program rudalnya. Pada tahun 1964 Korea Utara telah berhasil memproduksi plutonium untuk pembuatan dua senjata nuklir dengan berbagai tipe, salah satunya adalah CNN yaitu rudal dengan kemampuan hulu ledak tertinggi<sup>7</sup>. Ada alasan tersendiri yang mendorong Korea Utara pada masa ini untuk mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklirnya. Alasan pertama adalah faktor keamanan yaitu intervensi Amerika Serikat pada perang Korea menghalangi tujuan Kim Il Sung dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Kim Il Sung beranggapan bahwa nuklir merupakan senjata yang dapat menangkal atau mengalahkan pasukan Amerika Serikat dalam situasi konflik. Kedua, aliansi Korea Utara dengan Uni Soviet dan Cina yang sering mengalami pasang surut membuat Kim Il Sung mempertanyakan kepercayaannya kepada kedua Negara komunis itu dan juga komitmen untuk membantu Korea Utara menghadapi perang lainnya<sup>8</sup>.

Korea Utara pada tahun 1980an dicirikan dengan aksi – aksi bersifat permusuhan dan inisiatif mencurigakan, pada tahun ini Korea Utara dan Iran membangun sebuah kerjasama bilateral tentang nuklir dan rudal, dari tahun ini kemudian kedua Negara ini bekerjasama dalam bidang pengembangan teknologi rudal. Rudal Korea Utara ‘Taepodong Dua’ dan rudal Iran ‘Shahab-5’ yang dikenal

<sup>7</sup> Marcus Noland, *The economic Implications of a north Korea nuclear Test*, dalam Asian Policy, Washington D.C 2006, hal 25-39.  
<sup>8</sup>“Missile Overview,” [http://www.nti.org/e\\_research/profiles/NK/Missile](http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Missile), diakses pada tanggal 23/10/2012.

sebagai hasil dari kerjasama mereka. Secara jelas hal ini akan memberi dampak besar dalam perkembangan isu nuklir Iran dan Korea Utara<sup>9</sup>.

Akhir tahun 1980an, Korea Utara mulai mengurangi ketergantungannya dengan bantuan negara lain dalam melanjutkan program nuklirnya. Korea Utara mulai memproduksi uranium dan membangun reaktornya sendiri. Saat itu fasilitas rahasia pemisahan plutonium berskala besar berhasil dibangun di Yongbyon. Fasilitas ini mampu menghasilkan beberapa ratus ton bahan bakar dalam setahun, cukup untuk menangani bahan bakar dari seluruh reaktor. Keberadaan fasilitas ini ditemukan oleh Amerika Serikat yang kemudian menuduh Pyongyang telah membangun reaktor nuklir secara rahasia. Tahun 1982, satelit Amerika Serikat menangkap gambar yang menunjukkan pembangunan di Yongbyon termasuk fasilitas dan pabrik pengelolaan nuklir baru yang meningkatkan perhatian Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Diketahui bahwa Korea Utara sedang membangun sebuah fasilitas nuklir baru yaitu reaktor nuklir yang berdaya 50MW. Negara – negara ini mengetahui bahwa pabrik pengelolaan plutonium juga berada ditempat yang sama sehingga plutonium tersebut bisa digunakan untuk memproses bahan bakar nuklir dan kemudian mengembangkan senjata nuklir<sup>10</sup>. Sejak itu, program nuklir Korea Utara menjadi perhatian keamanan yang serius bagi Negara - negara sekitarnya termasuk Amerika Serikat.

---

<sup>9</sup>Ada kecurigaan koneksi nuklir antara Iran dan Korut,

[http://ki.the.co.kr/indonesian/news/news\\_hotissue\\_detail.htm?No=37415&id=hotissue](http://ki.the.co.kr/indonesian/news/news_hotissue_detail.htm?No=37415&id=hotissue) diakses pada

Program pengembangan senjata nuklir Korea utara dinilai mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan Negara – Negara internasional, hal ini dilandasi dengan perbincangan dari perwakilan Korea Utara kepada para pakar Amerika Serikat yang isinya, Korea Utara tidak lagi tertarik untuk menerima bantuan pangan Amerika Serikat sebagai imbalan untuk konsesi nuklir Korea Utara. Korea Utara juga mengatakan mereka akan mempertimbangkan kembali untuk mengakhiri bebas nuklir<sup>11</sup>. Oleh sebab itu beberapa Negara khususnya seperti Amerika Serikat langsung memberikan embargo ekonomi dan militer<sup>12</sup>. Amerika Serikat merasa berkewajiban dalam melakukan denuklirisasi di Korea utara hal ini terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dalam menjaga proliferasi nuklir dunia, oleh karena itu Amerika Serikat mengajak Negara – Negara lain untuk ikut serta dalam denuklirisasi Korea Utara.

Pada bulan April 1984, Korea Utara melaksanakan Uji coba rudal Scud-B yang pertama. Uji coba tersebut membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan NPT pada tanggal 12 Desember 1985 dan menandatangani perjanjian NPT di mana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir. Mikhail Gorbachev menekan Kim Il Sung dengan mengancam bahwa Moscow akan menghentikan bantuan ekonominya<sup>13</sup>. Korea Utara juga harus mendeklarasikan

<sup>11</sup> Kesal pada AS, Inilah Ancaman Terbaru Korut, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/08/18/m8xqkl-kesal-pada-as-inilah-ancaman-terbaru-korut> diakses pada 12/11/2012.

<sup>12</sup>Sanksi nuklir Korea utara, "http://www.jurnalhukum.blogspot.com" diakses pada tanggal 21/09/2012.

<sup>13</sup>Uk-Heo and Jung-Yeop Woo, *Op.Cit* hal 492

kepada IAEA keberadaan fasilitas Yongbyon. Tidak lama setelah bergabung dengan NPT, Korea Utara mulai menunjukkan keberatannya pada isi perjanjian. Korea Utara tidak terima akan adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir yang akan dilakukan oleh NPT selama tujuh tahun, Pada tahun 1993, Korea Utara mengancam untuk keluar dari NPT dan menolak nuklir inspeksi dari IAEA karena adanya perselisihan yang dihadapi IAEA dengan Pyongyang<sup>14</sup>, hal ini dikarenakan Korea Utara merasa tersinggung karena pihak IAEA menginginkan pemeriksaan khusus terkait dengan penemuan plutonium, satelit Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki jumlah plutonium yang lebih banyak dari yang dideklarasikan oleh Korea Utara, karena Korea Utara mendapatkan tekanan yang bertubi – tubi tersebut akhirnya pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Non-Proliferasi Nuklir<sup>15</sup>.

Berbagai macam cara diupayakan Negara – Negara untuk mengurangi ketakutannya atas ancaman nuklir Korea Utara salah satunya dengan dibentuknya *Six Party Talks*, *Six Party Talks* dimulai pada tanggal 27 Agustus – 29 Agustus 2003, yang beranggotakan Enam Negara yaitu Cina, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan, enam Negara ini memiliki tujuan sama yaitu untuk

---

<sup>14</sup>William J. Perry "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 67, 2006, hlm. 81.

<sup>15</sup> Saesmita: Dilemma Nuklir Korea "http://kathurrahman.blogspot.com/2007/07/dilemma-nuklir-korea-



menemukan resolusi damai tentang masalah keamanan sebagai akibat dari program senjata nuklir Korea Utara<sup>16</sup>.

Hingga saat ini pertemuan antar Negara anggota *Six Party Talks* sudah beberapa kali dilakukan. Rincian kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

Putaran pertama dilakukan pada bulan Agustus 2003 di Beijing. Dalam perundingan ini mulai digaungkan tujuan dari *Six Party Talks* yaitu penggunaan prinsip damai dalam mengatasi isu nuklir melalui negosiasi tetapi secara lebih jauh perundingan ini tidak mencapai kesepakatan, namun perundingan ini setidaknya berhasil memberikan teladan bagi perundingan semacamnya<sup>17</sup>.

Cina kemudian memfasilitasi putaran kedua, Perundingan *Six Party Talks* putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Februari 2004. Dalam perundingan ini dibicarakan masalah resolusi damai dalam menangani program nuklir sebagai landasan menjaga stabilitas perdamaian di Asia Timur Laut. Selain itu, disepakati juga bahwa denuklirisasi di Asia Timur Laut merupakan tujuan umum dari perundingan *Six Party Talks*<sup>18</sup>.

Perundingan *Six Party Talks* putaran ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 - 26 Juni 2004. Dalam perundingan ini terjadi perbedaan pandangan antara Korea Utara dengan Negara anggota yang lain mengenai denuklirisasi. Korea Utara berpandangan

---

<sup>16</sup>Perundingan enam Negara "[http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan enam negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_enam_negara)" diakses pada 23/10/2012.

<sup>17</sup>Hasil Kunjungan Utusan Khusus Presiden RI Ke Korea Selatan Dan Korea Utara, 6-13 Desember 2003 Serta Ke Tokyo, Washington Dc Dan New York, Tanggal 17-29 Januari 2004, "<http://www.deplu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=en...&ItemID=00b3fab7-52e6-4b1f-87ef-c9ae183fd030>" diakses pada tanggal 24/10/2012

<sup>18</sup>The Second Round of the Six-Party Talks (Overview and Evaluation)

"<http://www.diplomacy.gov.au/press/030204.htm>" diakses pada tanggal 24/10/2012

bahwa denuklirisasi nuklir hanya melucuti persenjataan berbasis nuklir tidak termasuk dalam program pengembangan uranium. Sedangkan Negara anggota yang lain untuk menghentikan juga program pengembangan uranium, namun pada putaran kedua dan ketiga ini, tidak satupun perundingan mencapai kemajuan berarti<sup>19</sup>. Pada bulan September 2004, Korea Utara menolak menghadiri Perundingan *Six Party Talks*.

Putaran keempat yang diselenggarakan dalam dua tahap di Beijing. Tahap pertama dimulai sejak 26 Juli hingga 7 Agustus pada tahun 2005. Dan tahap kedua dilaksanakan sejak 13-19 September 2005. Penolakan tersebut dikarenakan oleh "*hostile policy of United States*". Dinyatakan juga bahwa Pemerintah Korea Utara menegaskan kembali komitmennya untuk tidak menerima atau menyebarkan senjata nuklir sesuai dengan 1992 *Joint Declaration of the Denuclirization of the Korean Peninsula*<sup>20</sup>.

Putaran kelima *Six Party Talks* berlangsung pada 19 September 2005, pada putaran kelima *Six Party Talks* mengalami hambatan karena peristiwa *Macau Banco Delta Asia* di mana Amerika Serikat selaku Dewan Keamanan tetap PBB membekukan rekening Korea Utara yang diduga sebagai hasil pencucian uang. Pemerintah Amerika Serikat bersikeras bahwa sanksi ekonomi tersebut merupakan hal yang terpisah dengan *Six Party Talks*, sementara pemerintah Korea Utara tidak

---

<sup>19</sup> Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues  
"[http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n\\_korea/6party/talk0406.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html)" diakses pada tanggal 24/10/2012

<sup>20</sup> Xinhua News Agency, 19 September 2005

menyetujuinya. *SixParty Talks* putaran kelima mengalami kemunduran hingga tahun 2006, di mana Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada tanggal 9 Oktober 2006. Termasuk percobaan senjata jarak jauh Taepodong yang diperkirakan dapat menjangkau Hawaii dan beberapa bagian Alaska<sup>21</sup>, Putaran kelima *Six Party Talks* kembali dilanjutkan di Beijing pada bulan Desember, namun tidak menghasilkan resolusi apapun. Segala sesuatunya menjadi sedikit jelas pada akhir Desember ketika negosiator dari Amerika Serikat mengirim pesan kepada Kedutaan Besar Korea Utara di Beijing yang menanyakan apakah Korea Utara bersedia mengadakan dialog bilateral di luar Beijing. Korea Utara setuju dan kedua utusan Amerika Serikat serta Korea Utara bertemu di Berlin hingga mencapai sebuah kesepakatan baru. Perjanjian tersebut diresmikan pada tanggal 13 Februari saat putaran kelima *Six Party Talks* berakhir.

Perundingan *Six Party Talks* putaran keenam dilaksanakan pada bulan Februari 2007. Pada perundingan ini membicarakan tentang rencana denuklirisasi, anggota *Six Party Talks* memberikan batas waktu selama 6 hari kepada Korea Utara untuk membekukan program pengembangan nuklirnya dan pemberian dana *Banco Delta Asia*. Pada Juli 2007, Pyongyang melaksanakan program denuklirisasi nuklir dengan melucuti senjata – senjata nuklir di Yongbyon, dan pada bulan Oktober Pyongyang setuju untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan bantuan dan konsesi diplomatik. 3 Oktober 2007, pada perundingan tahap kedua dikeluarkan

---

<sup>21</sup>“North Korea’s Nuclear Test and its Aftermath: Coping with the Fallout”,

dokumen *Second-Phase Actions for The Implementation of The Joint Statement*, di mana Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan mengembangkan hubungan diplomatiknya<sup>22</sup>.

*Six Party Talks* sempat vakum karena ketidakjelasan para anggota mengenai kapan akan diadakan pertemuan kembali tetapi setelah 1 tahun vakum, pemerintah Cina mengupayakan untuk kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Desember 2006, yang didasari kekhawatiran mengenai suksesnya uji coba nuklir Korea Utara dan juga ambisi nuklir Korea Utara yang telah mengancam kepentingan Cina, terlepas dari pro dan kontra reaksi komunitas internasional terhadap uji coba nuklir, dunia internasional kemudian memberikan peringatan terhadap tindakan Korea utara ini, percobaan nuklir tetap saja akan berujung pada meningkatnya ketegangan internasional.

Setelah beberapa pihak mengupayakan denuklirisasi Korea Utara melalui *Six Party Talks* tetap saja belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. *Six Party Talks* dikatakan gagal karena Korea Utara masih mengembangkan nuklirnya dan melakukan serangkaian Uji coba nuklir yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun internasional.

---

<sup>22</sup> Major facts about six-party talks,

"http://www.dia.ic.gov.au/00001/00777/00851/6626560.htm" diakses pada 24/10/2012

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan persoalan atau permasalahan mengenai:

Mengapa upaya yang dilakukan anggota *Six Party* untuk program denuklirisasi Korea utara mengalami kegagalan?

### **D. Kerangka Teori**

Untuk mengkaji permasalahan nuklir Korea utara penulis menggunakan konsep yang pertama yaitu:

#### **1. Konsep Diplomasi**

Konsep diplomasi merupakan praktik komunikasi dan negosiasi atau pelbagai perwakilan dari Negara – Negara pada suatu tingkat, semua perangkat hubungan internasional yang dianggap sebagai kegagalan diplomasi. Pengertian dasar dari diplomasi merupakan suatu upaya untuk melakukan negosiasi. Diplomasi juga dapat berarti sebagai suatu tugas yang dijalankan oleh para diplomat atau wali dari suatu Negara untuk melakukan suatu hubungan dengan kedua Negara dengan menyampaikan peran – peran secara politik dari Negara utamanya. The Oxford English Dictionary memberikan konotasi diplomasi sebagai Manajemen Hubungan Internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil: bisnis atau seni para diplomat.<sup>23</sup> Diplomasi erat dihubungkan dengan hubungan antar Negara, merupakan suatu seni dalam mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara – cara

damai, apabila mungkin dalam berhubungan dengan Negara lain. Apabila cara damai tersebut gagal dalam memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman dan kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan tujuannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sir Ernest Sataw dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* yang berasumsi bahwa: <sup>24</sup>

Dalam memberikan karakterisasi diplomasi yang bagus meskipun tidak jelas dan kurang akurat. Ia mengatakan diplomasi adalah "*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*". (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah dengan Negara - Negara berdaulat).

Salah satu karakter yang menarik dari konsep diplomasi adalah penerapan diplomasi sebagai sarana dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi antara Negara satu dengan Negara lainnya. Diplomasi juga dapat diandalkan sebagai suatu strategi oleh suatu untuk membahas segala permasalahan baik dalam kerjasama bilateral, multilateral, regional, maupun internasional. Sekalipun hasil dari diplomasi itu gagal. Sebagai ilustrasi, banyak dari Negara-negara yang memanfaatkan jalur diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan atau konflik dari negaranya. Dengan diplomasi suatu Negara dapat melakukan negosiasi guna mendapatkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihaknya.

Permasalahan nuklir Korea Utara mendapatkan perhatian dari banyak pihak

suatu alat instrument diplomasi pada politik internasionalnya. Permasalahan nuklir merupakan isu yang sangat sensitif dalam politik internasional karena dari nuklir itu sendiri dapat digunakan menjadi sebuah senjata pemusnah massal sehingga Negara yang memiliki persenjataan nuklir otomatis akan memiliki nilai lebih dalam proses tawar menawar.

## 2. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik dapat diartikan sebagai penyelesaian konflik (*Conflict Resolution*) adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak – pihak yang terlibat di dalam konflik.

Sedangkan menurut Peter Wallensteen, Resolusi konflik adalah situasi sosial di mana pihak – pihak bertikai dalam konflik bersenjata dalam kesepakatan (sukarela) bertekad untuk hidup damai dengan dan atau menghilangkan perbedaan mendasar mereka dan karenanya menghentikan penggunaan senjata terhadap satu sama lain<sup>25</sup>.

Penyelesaian konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat konflik sehingga tidak ada lagi pertentangan antara mereka. Sulitnya menyelesaikan konflik diperlukan secara mutlak untuk mencegah : *Pertama*, semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak – pihak yang berkonflik. *Kedua*, semakin meluasnya konflik

---

<sup>25</sup>Peter Wallensteen *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*, London SAGE Publications Ltd, 2002, hal 8.

yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing – masing pihak yang berkonflik<sup>26</sup>.

Mengenai cara penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan melalui :

- **Negosiasi**

Negosiasi secara etimologi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan<sup>27</sup>.

Penjelasan negosiasi dari segi kebahasaan diatas belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- Menurut Jaqueline M. Nolan-Haley :

*“Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter.”* (Negosiasi dapat diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa)<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hal. 8-9

<sup>27</sup> Negosiasi “[http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi#cite\\_note-0](http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi#cite_note-0)” diakses pada 2/12/2012

<sup>28</sup> Haley Jacqueline, *Negotiation: Mediation; Arbitration; Dispute Resolution in the Court System*:  
Harvard Business School Press, West Publishing Company, 2001



- Menurut Fisher R dan William Ury :

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.<sup>29</sup>

Didalam negosiasi terdapat 2 paradigma yaitu *Bargaining* dan *Problem Solving*, Paradigma *bargaining* dan *problem solving* membagi asumsi dasar mengenai sifat negosiasi. Pertama, negosiasi dapat didefinisikan dalam kedua pendekatan sebagai proses yang dinamis yang terjadi ketika dua atau lebih pihak independen menghadapi konflik *interest* atau permasalahan bersama yang akan diselesaikan melalui jalan diplomatis daripada jalur militer. Teori negosiasi fokus pada proses pencapaian *agreement* atau *non agreement*. Kedua, dalam kasus negosiasi internasional, proses negosiasi dijalankan oleh individu tertentu atau aktor lain dalam panggung internasional. Ketiga, faktor – faktor yang mempengaruhi negosiator secara signifikan.

Orang – orang pada umumnya menganggap bahwa perbedaan antara kedua belah pihak menciptakan masalah. Namun sebenarnya perbedaan juga mengarah ke solusi<sup>30</sup>. Paradigma *bargaining* dan *problem solving* membagi asumsi dasar mengenai sifat negosiasi. Pertama, negosiasi dapat didefinisikan dalam kedua pendekatan sebagai proses yang dinamis yang terjadi ketika dua atau lebih pihak independen

---

menghadapi konflik *interest* atau permasalahan bersama yang akan diselesaikan melalui jalan diplomatis daripada jalur militer.

Paradigma *Bargaining* menjadi pendekatan yang dominan dalam topik negosiasi internasional selama tahun 1960an dan 1970an, *bargaining* menawarkan alternatif cara Negara untuk meraih *National Interest* mereka dalam dunia permusuhan. Perspektif kedua dalam negosiasi internasional yang kemudian dikenal sebagai *Problem Solving Paradigm*. *Problem solving* berpendapat bahwa negosiator harus mencari pijakan yang sama untuk menyelesaikan masalah bersama yang akan menguntungkan kedua belah pihak<sup>31</sup>.

Dalam melakukan negosiasi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kemauan (*Willingness*) untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela;
2. Keterlibatan seluruh pihak (*stakeholdereship*) dukungan seluruh pihak terkait;
3. Dapat menyatukan kepentingan dengan pihak lain;
4. Tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti<sup>32</sup>.

Dikaitkan dengan kasus ini, Korea Utara atas bantuan Cina dan Uni Soviet akan terus mengembangkan nuklir. Ada beberapa kepentingan yang mendasari Korea

---

<sup>31</sup>P. Tereence Hopman, "*Bargaining and Problem Solving: Two Perspective on International negotiation, in turbulent peace: The Challenges of managing international conflict*", ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, Washington, DC: United States institute of peace press 2001.

<sup>32</sup> Teknik negosiasi "<http://arwan20680.wordpress.com/2010/04/09/mengantar-tentang-negosiasi/>"

Utara untuk mengembangkan dan terus memperbaharui nuklir, yaitu adanya motif "regime survival". Dalam hal ini nuklir dijadikan sarana untuk melindungi rezim-rezim berikutnya, dengan pengembangan nuklir. Korea Utara juga mendapatkan *bargaining position* (posisi tawar) yang selama ini tidak pernah diterima Korea Utara dari komunitas Internasional. Langkah yang ditempuh Korea Utara dalam program pengembangan nuklir Korea Utara tampaknya menjadi ancaman bagi Internasional khususnya Asia Timur, karena merasa terancam Korea Selatan menggandeng sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Jepang guna memperkuat negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara.

Cina membentuk *Six Party Talks*, yang salah satunya sebagai upaya untuk program denuklirisasi Korea Utara dan juga untuk mencegah perang Korea Selatan dan Korea Utara terpicu kembali, Bagi Cina, ketegangan di Korea yang berlarut-larut justru amat mengganggu fokusnya dalam pembangunan ekonomi yang sedang dimasa keemasan. Korea yang bersatu dengan damai akan disambut baik oleh Cina karena dengan bersatunya Korea, maka Korea Utara akan menjadi lebih makmur dari sebelumnya, sehingga bertambah pula pasar produk-produk Cina, selain itu dengan bersatunya Korea tidak akan menyita energi dan ekonomi Cina. Jika terjadi perangpun, tentu pihak Cina tidak secara mudah lepas tangan dan akan tetap mengupayakan eksistensi Korea Utara, meskipun dalam skala terbatas lain halnya dengan Kepentingan Amerika Serikat dalam *Six Party Talk* tidak dapat diabaikan lagi di mana Korea yang damai akan menjadikan kehadiran Amerika

Serikat tidak diperlukan lagi di bumi Korea. Korea yang selalu dalam ketegangan akan menjadikan Amerika Serikat mempunyai alasan kuat untuk tetap berdiri di bumi Korea dan juga di Jepang. Dalam skala yang lebih luas, Asia Timur yang damai akan menjadikan hegemoni Amerika Serikat menjadi redup di wilayah itu, suatu hal yang tidak disukai oleh Amerika Serikat, dan yang juga dikhawatirkan adalah berkurangnya pembelian alutsista (Alat Utama sistem senjata) dari Korea Selatan dan Jepang kepada Amerika Serikat, anggota Negara *Six Party* memiliki kepentingan masing – masing yang tidak bisa diselaraskan, sehingga perundingan ini tidak bisa menemui titik terang, hal ini membuat negosiator lain merasa diperlakukan tidak adil dan negosiasi ini menjadi tidak menemui *win win solution*.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan pandangan diatas penulis mencoba untuk merumuskan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang ada, yaitu:

Karena adanya sikap dari masing–masing negosiator dalam perundingan *Six Party* yang terkesan tetap pada kepentingan negaranya sehingga perundingan ini tidak bisa menemukan solusi yang bisa memuaskan masing–masing pihak yang terlibat, hal inilah yang menjadi akar dari kegagalan *Six Party* dalam upaya damai dirundingasi Korea

## **F. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penulisan, Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu menjabarkan krisis nuklir di Semenanjung Korea terutama pada periode tahun 2006–2009, membahas mengenai pengaruh dan dampak dari program pengembangan nuklir Korea Utara, menganalisa upaya Korea Utara dalam mengatasi hambatan–hambatan dalam pengembangan program nuklirnya, dan juga membahas pertemuan–pertemuan mengenai *Six Party Talks* yang diadakan oleh enam Negara dalam program denuklirisasi Korea Utara, selain itu juga, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Hubungan Internasional, bahwa keinginan suatu Negara dalam memiliki dan mengembangkan nuklir tidaklah mudah.

## **G. Metode Penulisan**

Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu berdasarkan pada data yang telah tersedia, Dalam masalah data penulis menggunakan studi pustaka atau *Library Research* yang mana

#### 4. Artikel-artikel dan data dari internet

### H. Jangkauan Penulisan

Sebuah penulisan memerlukan adanya pembatasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar pengungkapan masalah lebih fokus dan terarah. Penulisan ini mengambil jangkauan waktu tahun 2006-2009, karena pada tahun 2006 Korea Utara melakukan Uji Coba senjata jarak jauh Taepodong yang diperkirakan dapat menjangkau Hawaii dan beberapa bagian Alaska, hal ini secara langsung memberi perhatian dan banyak kekhawatiran dari banyak Negara.

### I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Bab yang akan berusaha memaparkan

- BAB III Merupakan Bab yang akan berusaha memaparkan mengenai upaya internasional untuk program denuklirisasi Korea Utara
- BAB IV Merupakan Bab yang akan berusaha memaparkan mengenai isi pertemuan *Six Party Talks* dan menganalisa kegagalan *Six Party* dalam mengupayakan denuklirisasi Korea Utara.
- BAB V Merupakan Bab penutup yang akan berusaha memaparkan Kesimpulan dari bab sebelumnya